



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 429 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2022**

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, perlu diatur Regulasi Daerahnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN. 2008/No. 61, TLN No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN. 2009/No. 112, TLN No. 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 244. a);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270. a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Program Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemegang inovasi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun:
Up. a. Kepala Bagian Organisasi;
b. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
4. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 429 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 OKTOBER 2022
TENTANG : PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

NAMA-NAMA INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	OPTIMALISASI PELAYANAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KARTU KELUARGA (KK) DAN AKTA KELAHIRAN SECARA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	PELAYANAN SENYUM TABELA KTP-EL	
3	PERBAIKAN PELAYANAN KARTU KELUARGA, KTP-EL, KIA, PERPINDAHAN KEPENDUDUKAN SERTA UPDATE NIK MELALUI PELAYANAN ONLINE	
4	DESAK (DESA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	
5	MEMBANGUN LAMPION BERBASIS DIGITAL	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	
7	PELAYANAN PERIZINAN DI KECAMATAN SECARA TERPADU (PAPICAKEP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	PENGELOLAAN SISTEM PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK SECARA MANDIRI	
9	APLIKASI ELEKTRONIK TIKET WISATA BATU MAHASUR KUALA KURUN (E-BASUKUR)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
10	EKSOTIK GUNUNG MAS	
11	POJOK SENI DAN KUTA BUDAYA	
12	PENGEMBANGAN DATABASE KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

13	OPTIMEN BAJA (OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH)	SEKRETARIAT DAERAH
14	PENATAAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN (<i>RIGHTSIZING</i>) BERDASARKAN BEBAN KERJA	
15	SULI SI BATU SULI (MODEL PARTISIPATIF DALAM MEMBUAT BATIK MOTIF KHAS DAERAH)	SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
16	EFEKTIVITAS SISTEM ADMINISTRASI GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
17	SISTEM APLIKASI PELAPORAN SEKOLAH SECARA ONLINE "SIAP LAPON"	
18	PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS PERTANIAN
19	PENGUATAN IMPLEMENTASI PEMERINTAH MELALUI VALIDASI DATA PETANI DAN PELAKU USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS	
20	EFEKTIVITAS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN MELALUI SINKRONISASI INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
21	GERAKAN PEMANFAATAN LAHAN PANGAN DENGAN BERSUKARIA	
22	PMO BELL BOX TB, DERING KESEMBUHAN	DINAS KESEHATAN
23	SISTEM PELAYANAN KESEHATAN JIWA RUJUKAN KABUPATEN GUNUNG MAS (SIP KEJAR)	

24	SINDE JANGKUNG KA GUMAS (SISTEM INFORMASI DATABASE JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS)	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	SISRUJA (SISTEM INFORMASI DATA KERUSAKAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS)	
26	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BANGUNAN GEDUNG KAWASAN PERKOTAAN KUALA KURUN	
27	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
28	EFEKTIVITAS PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN MELALUI PEMBERDAYAAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS	
29	KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA LAPAK JARU KABUPATEN GUNUNG MAS	
30	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
31	OPTIMALISASI DAN PEMAMFAATAN WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GUNUNG MAS	
32	SIDAT (SISTEM INFORMASI DATA STATISTIK SEKTORAL) DI KABUPATEN GUNUNG MAS	
33	PENDEKTESIAN IDENTITAS PENGGUNA LAYANAN KOMINFO MELALUI SISTEM INFORMASI BUKU TAMU ELEKTRONIK "SI BUTA ELE"	
34	STRATEGI INTEGRASI LAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH MELALUI PUSAT DATA (SINYAL PEMDA PADAT)	

35	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI KERAKYATAN MASYARAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
36	OPTIMALISASI INFORMASI GANDER DAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
37	MULTI PROTEKSI PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI FORUM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK "MULTI PERAN RUANG BANKER TERPANA"	
38	TALI LASO (PITA KENDALI LAPOR SELALU DAN OPERASI YUSTISI) MENGIKAT PELAKU USAHA MINUMAN BERALKOHOL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39	PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN	
40	PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR DAN LONGSOR DI DESA / KELURAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS	DINAS SOSIAL
41	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	
42	WISATA KULINER INOVASI SHELTER TAMAN KOTA KUALA KURUN	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN UKM
43	SISTEM INFORMASI ABSENSI DIGITAL (SIADIL) DALAM IMPLEMENTASI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI KABUPATEN GUNUNG MAS	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
44	PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA MELALUI SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN METODE PEMBELAJARAN DISKUSI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
45	EFEKTIVITAS PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN GUNUNG MAS DENGAN METODE SARASEHAN DIALOG INTERAKTIF RADIO " SARDIKTIF"	

46	SISTEM DAN INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH (SIGANDA) BERBASIS WEB PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	BADAN KEUANGAN DAN ASET
47	"ASIYAP" INTEGRASI APLIKASI SIMGAJI PT. TASPEN (PERSERO) PALANGKA RAYA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS	
48	"EFEKTIFITAS ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS"	
49	SISTEM MONITORING PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ONLINE MENGGUNAKAN TAPPING BOX	BADAN PENDAPATAN DAERAH
50	EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN IZIN PENELITIAN DENGAN AIPON (APLIKASI IZIN PENELITIAN ONLINE)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
51	SISTEM PERENCANAAN ONLINE MUSRENBANG (SI RIMBANG)	
52	E-DOMPET (DOKUMEN PERENCANAAN ELEKTRONIK) PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	
53	STRATEGI PENAGGULANGAN STUNTING MELALUI KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (SILANTING KKN-T)	
54	PAJAKA PLUS (PATROLI JALAN KAKI PLUS)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
55	OBAT HERBAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH	RSUD KUALA KURUN
56	PENANGGULANGAN "MIRASANTIKA" (MINUMAN KERAS DAN NARKOTIKA) DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS	KECAMATAN TEWAH
57	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEASIBAN (ASIK) PADA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

58	IDENTIFIKASI POTENSI WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN MIRI MANASA	KECAMATAN MIRI MANASA
----	--	--------------------------

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG